

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Poerwodarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau

kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Kabupaten Trenggalek dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

Menurut Siagian pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berpearan penting dalam meningkatkan pendapatan setiap daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Pengelolaan potensi pariwisata di daerah Kabupaten Trenggalek menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini tercermin dalam arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadikan sebagai destinasi kedua setelah Bali. Di sisi lain, dukungan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangat positif memeberikan respon pengembangan pariwisata. Sebagai salah satu aspek yang

berpotensi dalam meningkat pendapatan daerah , pariwisata harus dikelola dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh.

Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli tentang pengelolaan pariwisata, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan pariwisata yang di kemukan oleh Blakely: koordinator, fasilitator, stimulator, motivator.

### **1) Koordinator**

Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pemabangunan. Mencakup peran pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal,regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industry pariwisata.

### **2) Fasilitator**

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan daerah. Sebagai fasliterator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serat dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang di berdayakan

Dalam membangun pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengelola pariwisata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata menyediakan lahan untuk masyarakat sekitar objek wisata untuk tempat membuka usaha.

### 3) Stimulator

Menurut Blakely Stimulator adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun objek dan daya tarik wisata. Dinas kebudayaan dan daya tarik wisata menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk berjualan seperti kantin sehingga mendatangkan keuntungan baik untuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Peran Dinas pariwisata Kabupaten Trenggalek sebagai motivator menstimulasi segenap pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan objek daya tarik wisata. Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan di objek wisata, masyarakat diajak bagaimana menjaga dan mengelola objek wisata agar tetap lestari dan menarik hati para pengunjung. Namun di sisi lain

pemerintah belum melibatkan pihak swasta baik investor atau perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Trenggalek. Pemerintah belum melibatkan pihak investor karena pengambil kebijakan di daerah Trenggalek belum menerima tawaran dari investor.

#### **4) Motivator**

Dalam pembangunan pariwisata peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak lepas dari dukungan masyarakat ataupun pengusaha di bidang pariwisata.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti : memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata hal ini diwujudkan melalui pemberian lahan kepada masyarakat tanpa memungut biaya, selain itu masyarakat juga di berikan motivasi melalui promosi pemasaran. Upaya pemerintah tersebut mendapat respon baik dari masyarakat.

## 2. Perkembangan Pariwisata

Ada beberapa hal yang bisa menunjang pengembangan objek wisata, ada lima jenis komponen dalam pariwisata menurut Ahdinoto, diantaranya:

- 1). Atraksi Wisata: merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk liburan. Atraksi ini diidentifikasi sebagai sumber daya alam serta sumber daya manusia yang perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi yang mampu menarik wisata. Atraksi wisata merupakan bagian terpenting dari pariwisata, jika tidak ada atraksi wisata maka komponen lain juga tidak akan ada.
- 2). Promosi dan Pemasaran: merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperkenalkan atraksi wisata supaya menarik para wisatawan untuk mengunjungi lokasi wisata, promosi dan pemasaran juga termasuk bagian penting dari pariwisata.
- 3). Pasar Wisata: Pasar wisata juga merupakan bagian penting dalam pariwisata. Meski dalam perencanaannya belum diperlukan riset mendalam, namun informasinya mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi dari wisatawan perlu dikumpulkan dari wisatawan yang akan berlibur.
- 4). Transportasi: Transportasi juga merupakan komponen penting dari pariwisata, dan juga akan berdampak besar bagi volume pembangunan pariwisata.

5). Masyarakat setempat yang akan menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut George McIntyre, bagian penting dalam pengembangan pariwisata adalah pengembangan yang berkelanjutan yaitu memiliki keterkaitan antara wisatawan serta masyarakat yang didukung juga oleh pemerintahan daerah setempat. dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa komponen tersebut sangat menentukan sebuah tempat wisata.<sup>12</sup>

Unsur pokok yang juga harus mendapat perhatian untuk menunjang pengembangan pariwisata menurut Suwanto adalah:<sup>13</sup>

#### 1). Objek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata merupakan potensi yang bisa mendorong datangnya wisatawan, umumnya daya tarik wisata berdasarkan:

- a. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya
- c. Adanya spesifik atau ciri khusus yang bersifat langka
- d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan
- e. Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan, dan lain-lain).

---

<sup>12</sup> Muljadi A.J, Kepariwisata dan Perjalanan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 57

<sup>13</sup> A. Oka Yoeti, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997, hal. 82

f. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

2). Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya.

3). Sarana wisata

Sarana wisata melupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

### **3. Fungsi Kedinasan dalam Pengembangan Pariwisata**

Mengacu pada Pasal 2, ayat 3 Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rosmedi dan Riza Risyanti, Zakat dan Wirausaha,(Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), hal.1

- 1). Menyusun Rencana Kerja Dins Pariwisata
- 2). Perumusan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
- 3). Pelaksanaan, Pelayanan, Pembinaan, dan Pengendalian urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata
- 4). Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan
- 5). Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
- 6). Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya dan atau Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **4. Pesisir Pantai**

Ekosistem pesisir pantai mempunyai kekayaan habitat yang beragam, didarat maupun dilaut yang saling berinteraksi antar habitat. Ada sumberdaya alam yang bisa pulih diantaranya sumberdaya perikanan (plankton, bentos, ikan, moluska, krustacea, mamalia laut), rumput laut, padang lumut, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumberdaya alam yang tidak bisa pulih berupaminyak, gas, bijih besi, pasir, timah, mineral serta bahan tambang lainnya.<sup>15</sup> Wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun

---

<sup>15</sup> Ibid hal 35

terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut air laut, angin laut, dan perembesan air laut. Bagian kawasan pesisir yang paling produktif adalah wilayah muka pesisir atau pantai. Daerah pantai adalah satu kawasan pesisir beserta perairannya dimana daerah tersebut masih terpengaruh baik oleh aktivitas darat maupun laut. Garis pantai merupakan suatu garis batas pertemuan (kontak) antara daratan dengan air laut. Posisinya bersifat tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Pantai terletak antara garis surut terendah dan air pasang tertinggi.<sup>16</sup>

## 5. Teori Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu social yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya kedalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, hukum. Secara garis besar ekonomi diartikan aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid hal 38

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> diakses pada 24 Oktober 2021

## 6. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah bencana nonalam karena pandemi diakibatkan oleh wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia.<sup>18</sup> Sedangkan wabah adalah penyebaran penyakit di masyarakat, dimana jumlah orang yang terjangkit lebih banyak dari pada biasanya pada komunitas atau musim tertentu. wabah dapat terjadi secara terus menerus, mulai dari hitungan hari hingga tahun. Wabah tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi bisa menyebar ke wilayah lain, bahkan ke negara lain. Dan penyakit dapat dikatakan sebagai wabah apabila sudah lama tidak terjangkit di masyarakat, muncul penyakit baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Penyakit tersebut baru pertama kali menjangkiti masyarakat suatu daerah.<sup>19</sup>

### a. Covid-19 dan Kesehatan

Covid -19 merupakan pandemi karena sifat dari covid-19 menyebar menjadi masalah dunia bukan lagi masalah negara. Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit serius seperti *MERS dan SARS*. Penularan ini dapat terjadi dari hewan ke manusia (*zoonosis*). Penularanpun juga bisa terjadi dari manusia ke manusia. Dan Covid-19 merupakan bencana non alam karena pandemi covid-19 diakibatkan oleh suatu peristiwa

---

<sup>18</sup> F.G Winarno, *COVID-19: Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi*, ( Jakarta: PT.Gramedia, 2020) hlm. 3

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 2

atau rangkaian peristiwa non alam seperti epidemi dan wabah penyakit.

b. Covid-19 dan Perekonomian

Belakangan ini Covid-19 menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid19 yang berdampak bagi Perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997/1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan , hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga, dan fungsi konsumsi , jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara saat ini, UMKM menjadi sektor yang sangat terpukul

secara langsung dari dampak wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena menurunnya konsumsi masyarakat secara signifikan.

Dampak covid-19 terhadap perekonomian juga dikarenakan China adalah negara tujuan utama ekspor Indonesia sejak tahun 2011. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun lalu nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 25,7 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan ke Jepang yang masing-masing berada pada peringkat kedua dan ketiga. China juga merupakan negara asal utama impor Indonesia. Tahun 2019, nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5 miliar dollar AS, atau setara dengan tiga dan lima setengah kali lipat dibandingkan nilai impor Indonesia dari Jepang dan Amerika Serikat. Lebih dari itu, China merupakan salah satu negara terbesar asal penanaman modal asing di Indonesia dan penyumbang lebih dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5 persen dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Penyebaran Covid-19 hingga ke 176 negara telah menambah ketidakpastian ekonomi global setelah sebelumnya terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (British exit) dan pergeseran-pergeseran geopolitik internasional. Ketidakpastian tersebut meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek Dalam Mengembangkan Tempat Wisata Pantai Prigi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dimasa Pandemi”

1. Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara, Resky Sirupang Kanuna bertujuan untuk memperoleh tentang bagaimana peran pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), berapa besar kontribusi sector pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknis *field research* (penelitian lapangan), *library research* dan penelusuran data *on line*. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti.<sup>20</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup> Resky Sirupang Kanuna, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Toraja Utara, melengkapi sarana serta prasarana penunjang pariwisata.

2. Penelitian Satruko, Engga bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan atau “field research” yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, metode yang dipakai adalah metode observasi, interview dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti. Hasil dari penelitian ini mengungkap permasalahan peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan berbagai infrastruktur yang terkait dalam kebutuhan pariwisata.<sup>21</sup>
3. Penelitian Ratna Medi bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Beruke Di Kabupaten Tana Toraja, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah dengan mengumpulkan data, memilih data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan

---

<sup>21</sup> Engga Satruko, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung 2019

potensi pariwisata religi Buntu Beruke Toraja tinjau dari peran pemerintah dalam pembangunan.<sup>22</sup>

4. Penelitian Zaferino Martins, Syamsul Alam Paturusi, Ida Bagus Ketut Surya bertujuan untuk meningkatkan Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Didaerah Branca Metiaut Dili, metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini agar pemerintah beserta masyarakat sekitar ikut berpartisipasi terhadap destinasi wisata alam agar berkembang sebagai daya tarik wisata.<sup>23</sup>
5. Penelitian Maghfirah T, Idris, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin, bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (Studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, observasi, wawancara, dan teknik sampling. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, dari penelitian ini untuk menganalisis Peran Dinas

---

<sup>22</sup> Ratna Medi, *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata BuntuBurake Di Kabupaten Tana Toraj*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Makassar

<sup>23</sup> Zaferino Martins, Syamsul Alam Paturusi, Ida Bagus Ketut Surya, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Didaerah Branca Metiaut Dili*, Jurnal Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, JUMPA3 (2):372-386 ISSN 2406-9116

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam mengembangkan Destinasi Kampung Wisata Jodipan dan Kampung Tridi.<sup>24</sup>

6. Penelitian Peran Dinas Pariwisata Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Goa Kiskendo (Studi Kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo) oleh Zahrotul Khasanah, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana tujuan peneliti bahwa Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam pengembangan potensi wisata Goa Kiskendo.<sup>25</sup>
7. Penelitian Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang oleh Nurfadilah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dalam mengelola objek wisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Enrekang.<sup>26</sup>
8. Penelitian Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara oleh

---

<sup>24</sup> Maghfirah T, Idris, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin, Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (Studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang), Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Volume 13, No 4, Tahun 2019, Hal 68-77 ISSN 2302-8432

<sup>25</sup> Zahrotul Khasanah, *Peran Dinas Pariwisata Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Goa Kiskendo (Studi Kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>26</sup> Nurfadila, *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang*, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata alam dan wisata budaya di kabupaten Tapanuli Utara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, teknik yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), *library research* (penelitian kepustakaan). Analisis yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif.<sup>27</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable development* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya alam buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pengembangan dan perekonomian masyarakat serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengelola kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat

---

<sup>27</sup> Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4(1) 2016:79-96 Universitas Medan Area

lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Pengembangan pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kabupaten Trenggalek.

Pengembangan serta peningkatan perekonomian masyarakat untuk menunjang kepariwisataan tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan arahan jaminan terpeliharanya ruang/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu diperhatikan. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain didukung oleh pengembangan yang menunjang dalam kegiatan pengelolaan pariwisata juga didukung oleh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik.

Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengelolaannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan. Pelaksanaan pengelolaan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks, tentunya sangat diperlukan adanya organisasi yang mantap dan tangguh, sehingga dengan demikian diharapkan sarana atau tujuan dapat tercapai secara optimal. Pemerintah kabupaten Enrekang melalui dinas kebudayaan dan pariwisata diharapkan mampu berperan dalam menunjang program pengelolaan pariwisata. Sesuai dengan fungsinya tersebut, dinas kebudayaan dan pariwisata, kabupaten Trenggalek menyusun program kerja yang dirasa relevan dengan keadaan kepariwisataan di Kabupaten Enrekang. Untuk menghindari terjadinya kesalahan teknis dilapangan selama melakukan penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi focus dari penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pikir model penelitian ini dapat dilihat pada bagan

### Bagan Kerangka Berpikir

